

Keamanan dan Sekuritisasi

dalam Hubungan Internasional

Buku ini dimaksudkan untuk memperkaya kajian studi keamanan dalam hubungan internasional termasuk di dalamnya proses sekuritisasi. Buku ini mengulas perkembangan, termasuk pergeseran konsep keamanan dari keamanan tradisional dan mencuatnya konsep keamanan non-tradisional (*Non-Traditional Security*, NTS). Selain itu, buku ini menunjukkan proses, peran, dan efektivitas sekuritisasi dari beberapa isu keamanan oleh beberapa aktor negara dan aktor non-negara lainnya.

Buku ini secara lebih mendalam membahas perkembangan teori sekuritisasi yang dilengkapi beberapa analisis kasus sekuritisasi di beberapa negara di dunia khususnya di Asia. Dalam perkembangannya, teori sekuritisasi mengalami modifikasi terutama terkait dengan area pembahasan, aktor, peran *speech act*, luaran dan dampak sekuritisasi, serta kondisi-kondisi yang memengaruhi sekuritisasi dan desekuritisasi. Buku ini secara khusus mengkaji penerapan teori sekuritisasi dalam kasus-kasus keamanan non-tradisional, seperti: sekuritisasi isu eksploitasi seksual anak laki-laki di bawah umur di Afghanistan, sekuritisasi Muslim Uighur di Xinjiang Tiongkok, sekuritisasi isu narkoba di Filipina serta sekuritisasi kabut asap di ASEAN, Singapura, dan Indonesia serta upaya Indonesia dalam sekuritisasi *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.

Buku ini menggarisbawahi dan menambahkan hal-hal yang esensial terkait dengan teori sekuritisasi, mengidentifikasi hal-hal penting yang berpengaruh terhadap sekuritisasi seperti peran *agency and structure* serta *media framing* di dalamnya. Buku ini *timely* karena menawarkan *insight* yang segar tentang sekuritisasi dari pelbagai isu keamanan non-tradisional mutakhir yang sering kali luput dari perhatian studi hubungan internasional. Tidak hanya mendalami pergeseran konsep keamanan dan proses sekuritisasi, buku ini diharapkan mampu untuk mendampingi para pelajar dan peneliti Hubungan Internasional dalam menganalisis perkembangan isu-isu keamanan dan proses sekuritisasi terhadap isu-isu mutakhir lainnya.

Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional



MELVANA MEDIA
Perumahan Batam
Jl. Batam Raya No. 8
Pasir Gunung Selatan, Kelapa Dua
Depok, Jawa Barat
Telp. 021-22327635
www.melvanamedia.com
IG. @penerbitmelvana



Agus Trihartono
Suyani Indriastuti
Chairun Nisya

KEAMANAN DAN SEKURITISASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL



Agus Trihartono
Suyani Indriastuti
Chairun Nisya

2020

KEAMANAN DAN SEKURITISASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

karya Agus Trihartono, Suyani Indriastuti,
Chairun Nisya

Copyright © 2019, Agus Trihartono, Suyani
Indriastuti, Chairun Nisya

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penyunting: Redaksi Melvana
Desain Sampul: Melvana Design
Penata Isi: Melvana Design

Cetakan Pertama, Januari 2020

ISBN: 978-623-7439-16-5



Perumahan Batam
Jl. Batam Raya No. 8
Pasir Gunung Selatan, Kelapa Dua
Depok, Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Shalawat serta Salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat, petunjuk serta karunia-Nya akhirnya kami mampu menyelesaikan buku yang berjudul “Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional”. Buku ini menjelaskan pergeseran studi keamanan dari konsep keamanan tradisional ke konsep keamanan non tradisional. Buku ini juga menjelaskan tentang konsep sekuritisasi *Copenhagen School* dan hasil modifikasi konsep tersebut. Keduanya kemudian diaplikasikan kepada beberapa studi kasus sekuritisasi di negara-negara Asia.

Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang menjadi penyokong dalam perwujudan buku ini, antara lain: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Universitas Jember khususnya LP2M melalui program Hibah Buku Teks Tahun 2019 Nomor Kontrak : 4704/UN25.3.1/

LT/2019, Centre for Research in Sosial Sciences and Humanities (C-RiSSH) dan para narasumber yang tidak dapat kami sebutkan. Selain itu, juga rekan-rekan yang telah membantu dalam menuangkan kemampuannya dalam buku ini. Secara khusus kami berterima kasih kepada Bapak Abubakar Eby Hara, Ph.D, Fikry Zuledy Pamungkas, S.Sos, dan Nur Muhammad Wildan F U, S.Sos.

Terakhir, jika ada bagian yang baik dari buku ini, bagian tersebut ada karena segala bantuan dan dukungan mereka. Namun, kalau ada bagian yang kurang dari buku ini, itu semua sepenuhnya dan semata-mata karena keterbatasan penulis.

Jember, 20 Januari 2020

Para penulis

Agus Trihartono

Suyani Indriastuti

Chairun Nisya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
PENDAHULUAN PERKEMBANGAN STUDI KEAMANAN DAN SEKURITISASI	i
Teori Sekuritisasi Copenhagen School	4
Modifikasi Teori Sekuritisasi	8
Referensi.....	16
BAB I SEKURITISASI TERHADAP TRADISI BACHA BAZI DI AFGHANISTAN.....	17
Pendahuluan.....	17
Sejarah Bacha Bazi.....	19
Praktik Tradisi Bacha Bazi.....	21
Bacha Bazi sebagai Ancaman Kemanusiaan	27
Upaya Sekuritisasi terhadap Bacha Bazi	33
Identifikasi Proses Sekuritisasi terhadap Bacha Bazi	35

Penutup	49
Referensi.....	51

BAB 2

SEKURITISASI TERHADAP ETNIS UIGHUR

DI XINJIANG 55

Pendahuluan.....	55
Provinsi Xinjiang dan Muslim Uighur	58
Sekuritisasi terhadap Uighur di Xinjiang.....	61
Keberlanjutan Upaya Sekuritisasi Muslim Uighur.....	72
Penutup	79
Referensi.....	81

BAB 3

SEKURITISASI NARKOBA DI FILIPINA..... 87

Pendahuluan.....	87
Sekuritisasi, Speech act dan Media Framing.....	89
Gambaran Umum Peredaran dan Penggunaan Narkoba di Filipina	93
Sekuritisasi Narkoba di Filipina	97
Sekuritisasi HAM Sebagai 'Counter-movement' Sekuritisasi Narkoba Duterte	110
Referensi.....	115

BAB 4	
SEKURITISASI KABUT ASAP (HAZE) DI ASEAN, INDONESIA, DAN SINGAPURA.....	127
Pendahuluan.....	127
Two-Level Games Analysis dan Sekuritisasi Kabut Asap di Asia Tenggara	129
Sekuritisasi Polusi Kabut Asap di Singapura.....	133
Sekuritisasi Polusi Kabut Asap di Indonesia.....	140
Sekuritisasi Polusi Kabut Asap di ASEAN.....	147
Penutup	151
Referensi.....	154
BAB 5	
SEKURITISASI ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING (IUUF) DI INDONESIA.....	163
Pendahuluan.....	163
Teori Sekuritisasi.....	166
Negara sebagai Referent Object	171
Ekosistem Laut sebagai Referent Object	179
Pertanyaan tentang Desekuritisasi	186
Penutup	195
Referensi.....	197

KESIMPULAN	205
GLOSARIUM.....	217
INDEKS	219
TENTANG PENULIS	221



PENDAHULUAN PERKEMBANGAN STUDI KEAMANAN DAN SEKURITISASI

Studi keamanan telah mengalami pergeseran semenjak awal tahun 1990-an. Definisi “keamanan” dipertanyakan dan diinterpretasikan menjadi beberapa pengertian baru. Dalam pengertian tradisional, “keamanan” hanya mencakup keamanan yang berkaitan dengan negara dan usaha untuk menghadapi kekuatan militer negara lain. Namun, menurut Buzan, Weaver, dan Wilde dalam pengertian yang lebih modern, studi keamanan berfokus pada aktor non-negara dan ancaman non-militer (Buzan, Waever, and Wilde 1998). Studi keamanan yang modern tersebut disebut juga *Non-Traditional Security* (NTS). Isu-isu dalam NTS dilihat sebagai segala bentuk ancaman yang tidak hanya mengancam kedaulatan negara dan teritorialnya, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat, baik kelompok maupun individu.

Redefinisi studi keamanan tersebut sesuai dengan perkembangan dalam hubungan antarnegara di dunia baik dalam aspek politik,

BAB I SEKURITISASI TERHADAP TRADISI BACHA BAZI DI AFGHANISTAN

PENDAHULUAN

Eksplorasi seksual adalah sebuah kejahatan yang melibatkan sebuah kelompok atau individu yang mengeksploitasi seseorang dengan cara membujuk atau biasa disebut *grooming*. Organisasi *Parents Against Child Exploitation* (PACE) di Inggris mendeskripsikan *grooming* sebagai taktik yang digunakan oleh para pelaku eksploitasi seksual yang dilakukan secara berkala, secara langsung (*offline*) maupun dalam jaringan internet (*online*) untuk mengelabui korban (PACE, 2016). Meski korban dari eksplorasi seksual sebagian besar merupakan anak-anak, namun bukan tidak mungkin remaja dan orang dewasa menjadi korban dari eksploitasi seksual. Para pelaku biasanya mengincar orang-orang yang mereka anggap lebih lemah baik secara fisik, mental, ekonomi, jabatan, atau kelas dalam strata sosial.

BAB 2

SEKURITISASI

TERHADAP ETNIS UIGHUR

DI XINJIANG

PENDAHULUAN

Dalam dua abad terakhir telah terjadi banyak perubahan dalam studi keamanan. Setelah berakhirnya Perang Dingin, negara-negara di dunia memulai percakapan tentang studi keamanan yang tidak lagi memandang keamanan internasional dan nasional sebagai dua komoditi utama. Studi keamanan yang berfokus terhadap keamanan sebuah negara dari ancaman militer mulai dikaji kembali dari beberapa perspektif. Pengkajian ulang terhadap studi keamanan mulai memunculkan beberapa konsep dan pemahaman baru. Salah satunya adalah gagasan tentang keamanan yang tidak hanya berfokus terhadap ancaman yang mengancam negara tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat, individual dan aktor non-negara lainnya. Pada masa kekuasaan bipolar tersebut juga terdapat beberapa ancaman berupa kekerasan etnis, runtuhnya beberapa negara, migrasi yang terjadi secara masif,

BAB 3

SEKURITISASI NARKOBA DI FILIPINA

PENDAHULUAN

Peredaran narkoba secara ilegal saat ini telah menjadi permasalahan internasional yang cukup meresahkan. *The United Nations Offices on Drugs and Crime/ UNODC* dalam laporan tahunannya yang bertajuk *the World Drug Report 2019* menyebutkan bahwa sekitar 5.5 % penduduk dunia yang berusia antara 15 hingga 64 tahun telah menjadi pengguna narkoba. Pada tahun 2017, sekitar 585.000 orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba secara global mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sekitar 50 *metric tons* (MT) pada tahun 2007 menjadi sekitar 247 MT pada tahun 2017 (UNODC, 2019b). Hal tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkoba telah menjadi ancaman yang nyata bagi umat manusia.

Maraknya penggunaan dan peredaran narkoba ilegal menuai respons dari pelbagai kalangan. Kampanye anti narkoba gencar dilaksanakan

BAB 4

SEKURITISASI KABUT ASAP (HAZE) DI ASEAN, INDONESIA, DAN SINGAPURA

PENDAHULUAN

Saat ini isu-isu keamanan telah berkembang pesat, tidak hanya tentang keamanan tradisional dalam konteks keamanan teritorial dan kekuatan militer suatu negara, namun telah meluas pada isu-isu keamanan-keamanan non-tradisional. Salah satu contoh isu keamanan non-tradisional adalah ancaman polusi kabut asap (*haze*). Di kawasan Asia Tenggara, polusi kabut asap telah menjadi salah satu topik yang krusial karena terjadi secara reguler hampir setiap tahun yang mana terdapat beberapa kejadian yang ekstrem, misalnya tahun 1982/83, 1987, 1991, 1994, 1997/1998, 2002, dan beberapa tahun terakhir ini. Disinyalir sumber kabut asap tersebut adalah dampak kebakaran hutan yang terjadi di pulau Kalimantan dan Sumatera, Indonesia terkait dengan pembukaan lahan pertanian dan lahan perkebunan kelapa sawit di dua pulau tersebut.

BAB 5

SEKURITISASI ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING (IUUF) DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Bab ini membahas upaya Indonesia untuk menangani masalah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) yang merupakan ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia selama Presiden Joko Widodo (selanjutnya akan disebut Jokowi). Ancaman telah berlangsung selama bertahun-tahun dan sangat merugikan Indonesia karena besarnya jumlah ikan yang dicuri oleh kapal asing dan perusakan ekosistem lautnya. Namun, ancaman ini tidak ditangani dengan tegas oleh pemerintah sebelumnya meskipun hak untuk melakukan penindakan tersebut sah karena perahu-perahu ilegal telah melewati wilayah perairan Indonesia yang memiliki undang-undang dan peraturan untuk mengatasinya. Bersamaan dengan peluncuran Indonesia sebagai *Global Maritime Fulcrum*, Presiden Jokowi mengambil tindakan keras dengan menenggelamkan kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal

KESIMPULAN

Globalisasi yang berkembang pada abad ke-21 membawa pengaruh pada studi keamanan internasional. Globalisasi satu sisi memberi peluang kepada masyarakat internasional untuk melakukan interaksi dan transaksi internasional dengan lebih mudah. Kecanggihan teknologi komunikasi dan transportasi memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat di belahan bumi yang lain. Namun, di samping keuntungan tersebut, globalisasi juga memicu muncul dan meluasnya kejahatan-kejahatan transnasional seperti *human trafficking*, *drug trafficking*, penyebaran HIV/AIDS, terorrisme, dan sebagainya. Permasalahan ini memicu pergeseran fokus studi keamanan internasional dari yang semula hanya fokus tentang keamanan tradisional (keamanan negara dalam konteks keamanan militer, teritori, serta kedaulatan dan kepentingan nasional) meluas menjadi keamanan non-tradisional yang menyangkut isu-isu keamanan individu dalam kehidupan sehari-hari.

Isu keamanan non-tradisional ini mendorong UNDP untuk merumuskan konsep *human security* yang terdiri dari tiga elemen, yaitu *freedom from want, fear, dan to live in dignity*. Keamanan manusia atau yang sering juga disebut sebagai keamanan insani dapat diartikan sebagai *safety from such chronic threats as hunger, disease and repression, as well as 'protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs or in communities'* (UNDP, 1994: 23). Konsep keamanan ini memuat jangkauan yang luas terkait dengan perlindungan keamanan manusia dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap kekerasan langsung (*direct violence*) maupun kekerasan struktural (*structural violence*).

Seiring dengan perkembangan tersebut, *Copenhagen School* yang dipelopori oleh Barry Buzan mencetuskan konsep sekuritisasi. Konsep ini bermanfaat untuk menjelaskan bagaimana proses munculnya isu keamanan, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Pada esensinya, sekuritisasi merupakan proses menjadikan isu biasa yang bersifat non-politis menjadi sebuah isu penting yang memerlukan kebijakan politik. Konsep Buzan ini dikritik oleh ilmuwan lain memiliki beberapa kelemahan, antara lain adalah tidak menjelaskan motif sekuritisasi, tidak memiliki ukuran yang jelas tentang efektivitas sekuritisasi, serta bersifat *European Centris* (Caballero-Anthony, Emmers, and Acharya 2004).

Dalam perkembangannya, teori sekuritisasi mengalami modifikasi terutama terkait dengan area pembahasan, aktor, peran *speech act*, luaran dan dampak sekuritisasi, serta kondisi-kondisi yang memengaruhi sekuritisasi dan desekuritisasi. Untuk mendalami lebih jauh tentang

sekuritisasi, buku ini mengkaji penerapan teori sekuritisasi dalam kasus-kasus keamanan non-tradisional di Asia. Bab 1 buku ini mengkaji tentang sekuritisasi eksploitasi seksual anak laki-laki di bawah umur di Afghanistan. Bab 2 membahas tentang sekuritisasi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang Tiongkok. Sementara itu, buku ini juga membahas tentang sekuritisasi narkoba di Filipina di Bab 3. Bab 4 buku ini membahas tentang sekuritisasi kabut asap di ASEAN, Singapura, dan Indonesia. Berdasarkan studi kasus di beberapa wilayah Asia tersebut, buku ini menggarisbawahi atau menambahkan hal-hal yang penting terkait dengan teori sekuritisasi. Buku ini mengidentifikasi hal-hal penting yang berpengaruh terhadap sekuritisasi, antara lain adalah peran *agency and structure* serta *media framing* dalam sekuritisasi.

Agency merujuk pada kapasitas atau kapabilitas aktor untuk bertindak sesuai dengan preferensinya tanpa campur tangan pihak lain. Sementara itu, *structure* merupakan aturan, norma, atau struktur sosial lainnya yang mungkin mendukung atau menghambat peran aktor dalam pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, *agency* merupakan atribut-atribut internal yang dimiliki oleh aktor, sementara *structure* adalah aspek eksternal atau di luar aktor yang berpengaruh. Ilmuwan masih memperdebatkan apakah *agency* ataukah *structure* yang sesungguhnya berperan dalam memengaruhi kebijakan politik. Namun tulisan ini berpendapat bahwa dikotomi apakah *structure* atau *agency* yang berperan adalah kurang relevan. *Agency* berpengaruh dalam proses politik jika seorang aktor memiliki power, kapasitas, maupun kapabilitas yang tinggi. Sebaliknya jika aktor lemah dan didikte oleh lingkungan

sosial politiknya, maka dalam hal ini *structure* lebih berpengaruh dalam kebijakan politik dibandingkan dengan *agency*.

Esensi dari sekuritisasi adalah bagaimana *speech* atau kata-kata yang disampaikan oleh *speakers* memengaruhi *hearers*. Bagaimana *speakers* meyakinkan *audience* tentang keberadaan ancaman serta perlunya tindakan-tindakan atau kebijakan politis untuk menanggulangi ancaman tersebut. Dalam hal ini kapasitas dan kapabilitas aktor dalam menyebarkan informasi dan meyakinkan atau mempersuasi pendengar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sekuritisasi. Kata-kata atau *speech* memiliki kekuatan (*powerful*) jika disampaikan oleh aktor yang memiliki power dan kedudukan serta bagaimana strategi yang dimainkan oleh aktor dalam meyakinkan pendengar. Kemampuan aktor untuk menafsirkan preferensi politik dan kebutuhan *audience* serta mampu menggunakan bahasa-bahasa yang persuasif berkontribusi pada keberhasilan sekuritisasi.

Di samping itu, *agency* juga berpengaruh tidak hanya dalam proses konstruksi sebuah ancaman, namun *agency* juga berpengaruh terhadap pilihan-pilihan tindakan politis yang diambil untuk menanggulangi ancaman yang telah dikonstruksi tersebut. Meskipun aktor-aktor telah menyepakati tentang adanya ancaman yang nyata, namun kebijakan politis yang diambil sangat mungkin berbeda. Di sinilah esensi peran *agency* dalam sekuritisasi di mana kapasitas, kapabilitas ataupun atribut-atribut lain yang dimiliki oleh aktor berpengaruh dalam konstruksi sebuah ancaman dan tindakan penanggulangannya.

Struktur lingkungan sosial, ekonomi, politik dapat berpengaruh pada efektivitas sekuritisasi, baik menghambat ataupun mendukungnya.

Audience yang merupakan target sekuritisasi memiliki latar belakang budaya, konteks politik, serta struktur sosial yang berbeda-beda. Pemahaman yang baik tentang *structure* sangat penting bagi efektivitas sekuritisasi. Di samping itu, struktur atau konstelasi politik ataupun kompleksitas keamanan di mana aktor-aktor sekuritisasi maupun *audience* berada berpeluang berpengaruh dalam sekuritisasi. Dalam tataran pemerintah suatu negara, struktur global seperti perjanjian internasional, norma universal, ataupun *power relations* antarnegara berpengaruh terhadap sekuritisasi dan kebijakan politik yang diambil. Demikian pula hanya dengan struktur domestik seperti kepentingan ekonomi politik aktor domestik berpengaruh terhadap konstuksi sebuah ancaman. Pemerintah cenderung tidak mengambil kebijakan politik yang merugikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap struktur sosial dan politik yang ada sangat penting dalam proses sekuritisasi. Pengaruh *structure and agency* dalam sekuritisasi dapat dilihat dalam beberapa studi kasus sekuritisasi di Asia yang dijabarkan dalam bab 1 hingga bab 4 buku ini.

Studi tentang sekuritisasi tradisi *bacha bazi* di Afghanistan menemukan bahwa kelima faktor penentu keberhasilan sebuah proses sekuritisasi tidak dapat terpenuhi dengan baik pada proses tersebut. Aktor-aktor inisiasi proses sekuritisasi *bacha bazi* menggunakan konsep keamanan nasional agar pemerintah Afghanistan ingin terlibat dalam upaya sekuritisasi *bacha bazi*. Para aktor menyajikan *bacha bazi* sebagai sebuah ancaman terhadap kestabilan ekonomi dan politik Afghanistan. Hal ini didukung oleh adanya pernyataan masyarakat korban *bacha bazi* di Afghanistan yang masih berjuang bersama Taliban demi

mendapatkan keamanan yang mampu dipenuhi di bawah kekuasaan Taliban. Walaupun para aktor yang meninisiasi adanya sekuritisasi telah berhasil melibatkan pemerintah, sekuritisasi terhadap *bacha bazi* mengalami kegagalan disebabkan oleh tingkat korupsi dan kemiskinan yang tinggi di Afghanistan. Sebagai salah satu dari negara terkorup di dunia menjadikan hokum di Afghanistan sebagai sebuah komoditi yang dapat diperjual-belikan. Pada akhirnya, lingkaran *bacha bazi* tidak dapat dihentikan meski pemerintah telah melakukan *speech act* yang meletakkan urgensi terhadap *bacha bazi* sebagai sebuah ancaman manusia dan ancaman terhadap stabilitas politik dan ekonomi nasional.

Studi tentang sekuritisasi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang Tiongkok menemukan bahwa upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok merupakan salah satu contoh bagaimana *speech act* digunakan untuk membentuk konstruksi akan Muslim Uighur sebagai sebuah ancaman nasional. Diskriminasi sistematis yang dilakukan pemerintah Tiongkok memunculkan kemarahan di kalangan etnis Uighur. Sebagai hasilnya, masyarakat Uighur melakukan demonstrasi dan sebagian dari mereka juga melakukan penyerangan terhadap warga etnis Han di Xinjiang atau melakukan bom bunuh diri sebagai aksi protes. Serangan-serangan tersebut digunakan oleh pemerintah Tiongkok dalam melakukan propaganda dan mengonstruksi opini publik mengenai Muslim Uighur. Setelah adanya *speech act* yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, selanjutnya pemerintah melakukan beberapa langkah ekstrem seperti penahanan dan pengawasan secara ketat di provinsi Xinjiang. Meski potret Muslim Uighur yang dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat Tiongkok adalah alasan utama adanya

sekuritisasi terhadap etnis tersebut, nyatanya inisiasi program OBOR juga melatarbelakangi adanya proses sekuritisasi tersebut. Keinginan dan kebutuhan akan pasokan energi membuat pemerintah Tiongkok berusaha untuk dapat menguasai sumber daya alam mineral di Xinjiang. Selain itu, program pemerintah untuk mencapai angka satu juta pekerja tekstil pada tahun 2023 juga menjadi salah satu alasan Muslim Uighur ditangkap dan dimasukkan ke kamp re-edukasi. Pemerintah Tiongkok, melalui beberapa kesaksian mantan tahanan, memperkerjakan Muslim Uighur secara paksa di kamp-kamp tersebut dan menanamkan paham-paham komunis untuk menghapus nilai-nilai agama dari Muslim Uighur. Walaupun pemerintah Tiongkok tetap pada pendiriannya dan memberikan bingkai yang baik terhadap kamp re-edukasi ke mata internasional, banyak organisasi internasional yang mengancam segala bentuk pelanggaran HAM yang di atasnamakan kepentingan keamanan nasional oleh Tiongkok.

Kajian tentang sekuritisasi narkoba di Filipina menunjukkan bahwa peran *agency* sangat menentukan bagaimana persepsi tentang sekuriti/keamanan, serta sekuritisasi yang dijalankan. Kebijakan penanggulangan narkoba yang diambil oleh pemerintah Filipina beragam, mulai dari yang ringan, moderat, hingga ekstrem. Hal ini dipengaruhi oleh preferensi dan bagaimana presiden menafsirkan narkoba sebagai sebuah ancaman. Presiden Rodrigo Duterte menjadi figur dan aktor sentral dalam sekuritisasi narkoba di Filipina sejak tahun 2016 ketika ia terpilih sebagai presiden Filipina. Program utama pemerintahannya yaitu perang terhadap narkoba bertujuan untuk memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Oleh karena itu, Duterte menerapkan kebijakan ekstrem

berupa tembak di tempat pelaku pengedar dan pengguna narkoba. Sekuritisasi ini relatif berhasil terbukti dengan menurunnya jumlah pengguna narkoba setahun setelah program 'war on drug' dilancarkan oleh Duterte. Ditinjau dari sisi *agency*, efektivitas sekuritisasi di Filipina ini tidak terlepas dari karakter, kapasitas, dan kapabilitas Duterte dalam menjalankan kebijakannya memerangi narkoba. Meskipun dikritik oleh banyak pihak serta munculnya counter-movements terhadap kebijakannya dengan mengatasnamakan HAM, Duterte tetap teguh menjalankan program *war on drug* yang dilancarkannya.

Berbeda dengan kasus narkoba di Filipina yang menonjolkan peran *agency* dalam sekuritisasi, peran *structure* lebih menonjol dalam sekuritisasi kasus kabut asap di Asia Tenggara. Kabut asap Asia Tenggara akibat kebakaran hutan di Indonesia telah terjadi sejak tahun 1960-an dan berdampak di Malaysia dan Singapura. Kedua negara yang terdampak ini melakukan aksi protes maupun mengirimkan nota diplomatik kepada Indonesia. Mereka juga melakukan lobi di tingkat regional agar ASEAN membentuk seperangkat perjanjian tentang penanggulangan kabut asap. Perjanjian kabut asap berhasil dirumuskan pada tahun 2002 di mana Indonesia baru meratifikasi perjanjian tersebut 12 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2014. Buku ini berpendapat bahwa faktor *structure* dominan memengaruhi sekuritisasi kabut asap ini.

Structure pada level regional Asia Tenggara yang menghambat penanggulangan kabut asap adalah prinsip ASEAN way di mana negara-negara ASEAN sepakat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Meskipun kabut asap telah menjadi polusi transnasional, tetapi sumber permasalahan ada dalam ranah domestik Indonesia.

Sepanjang Indonesia tidak meratifikasi perjanjian kabut asap tersebut, negara-negara ASEAN tidak dapat memaksa Indonesia untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Dari sisi internal Indonesia, faktor struktur ekonomi politik pembangunan menyebabkan persoalan kebakaran hutan dan kabut asap sulit ditangani. Pemerintah Indonesia semenjak Presiden Soeharto, B.J. Habibie, SBY, maupun Jokowi menaruh perhatian besar terhadap masalah kabut asap tersebut. Bahkan mereka selalu meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap yang melanda kedua negara tersebut baik secara langsung maupun melalui media masa. Namun sekuritisasi ini berbenturan dengan kepentingan ekonomi politik sehingga menyebabkan tidak optimalnya penanggulangan kebakaran hutan dan kabut asap.

Studi kasus pada buku ini juga menjelaskan bagaimana *media framing* berperan dalam sekuritisasi. Di satu sisi, sekuritisasi merupakan produk kerja media masa melalui *media framing*. Di sisi lain, sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik menjadi lahan berita bagi media. *Framing* memungkinkan para jurnalis untuk menulis secara rutin atau reguler berita yang menarik perhatian masa. Pemberitaan secara terus menerus oleh media tentang kasus tertentu, tentang dampak negatif atau ancaman yang mungkin ditimbulkannya akan memengaruhi pandangan masyarakat (*audience*). Oleh karena itu, buku ini berpendapat bahwa *media framing* sangat berperan dalam proses sekuritisasi.

Media masa berperan sebagai mediator dalam *speech act* yang menghubungkan aktor sekuritisasi dengan *audience* dengan cara memberitakan secara terus-menerus suatu kasus hingga *audience*

terpengaruh bahwa hal yang diberitakan tersebut benar-benar sebuah ancaman. Dalam proses ini terdapat *discourse of security* yang difasilitasi oleh media yang di dalamnya media berperan aktif dalam proses *agenda setting*. Agenda setting ini merujuk pada proses penentuan berita mana yang akan ditonjolkan oleh media masa, sementara itu media framing merujuk pada aspek apa dari berita yang telah dipilih tersebut yang akan ditonjolkan atau dihilangkan sehingga membentuk opini publik tertentu. Dengan kata lain media masa berperan tidak hanya menyebarkan berita tentang kasus tertentu, tetapi juga mengonstruksi bagaimana cara masyarakat atau *audience* memahami kasus tersebut. Media masa tidak hanya menyebarkan beritan, namun mengemas berita tersebut sedemikian rupa sehingga pesan sekuritisasi ataupun desekuritisasi tersampaikan kepada masyarakat.

Selain sebagai mediator, media masa sering kali turut andil dalam proses sekuritisasi. Mereka sering kali memiliki kedekatan khusus dengan aktor sekuritisasi maupun pihak-pihak lain yang terdampak sekuritisasi. Dalam beberapa kasus, media sangat mungkin berpihak pada aktor tertentu, baik untuk melakukan sekuritisasi maupun desekuritisasi. Media masa dalam hal ini tidak bebas nilai dan memiliki agenda tersendiri yang menguntungkan mereka. Media masa sering kali juga dimiliki oleh perusahaan yang memiliki afiliasi dengan lembaga yang terkait dengan kasus yang disekuritisasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran media masa dalam melakukan framing atas kasus tertentu sangat penting untuk memahami proses sekuritisasi secara comprehensive. Dengan kata lain, pemahaman tentang komunikasi

politik, yang belum dibahas secara detil oleh *Copenhagen School*, sangat bermanfaat untuk memahami sekuritisasi.

Studi tentang sekuritisasi terhadap penangkapan ikan ilegal atau IUUF di Indonesia menemukan keunikan pada motifasi yang melatar belakangi adanya sekuritisasi terhadap IUUF. Ketika konsep sekuritisasi dari mahzab Copenhagen menyatakan bahwa tindakan sekuritisasi dilakukan untuk membawa status masalah keamanan menjadi masalah yang mendesak sehingga tindakan apa pun dapat diambil untuk mengatasinya, langkah Indonesia dalam memberlakukan hukuman penenggelaman kapal asing adalah bentuk pelaksanaan peraturan yang diawasi oleh UU 45/2009 tentang perikanan, Pasal 69 (4). Meski pemberlakuan aturan tersebut mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat Indonesia, pemerintah memutuskan untuk tidak langsung melakukan aplikasi dari aturan tersebut. Sebaliknya, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kepada negara-negara tetangga untuk meminimalisir adanya ketegangan yang mungkin muncul setelah pemberlakuan aturan tersebut. Setelah pengaplikasian aturan penenggelaman kapal asing tang melakukan IUUF di wilayah perairan Indonesia, pemerintah mampu mendapatkan kepercayaan publik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintah meningkat setelah adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

Selain itu, dalam proses sekuritisasi IUUF beberapa negara tetangga, utamanya Taiwan melakukan protes kepada pemerintah Indonesia. Protes tersebut dilayangkan karena kebijakan Indonesia dinilai terlalu keras dalam menyikapi IUUF. Namun, cara Indonesia dalam mempromosikan

kebijakannya juga menjadi bahasan yang menarik. Indonesia mengemas kebijakannya sebagai sebuah cara untuk tidak hanya menghentikan praktik IUUF, tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi ekosistem laut yang terancam. Ekosistem laut menjadi salah satu objek sekuritisasi yang dilakukan oleh Indonesia karena ditemukannya kerusakan di ekosistem laut Indonesia akibat racun, bom dan lampu serta metode penangkapan ikan yang digunakan kapal-kapal asing. Sebagai hasil, sekuritisasi terhadap IUUF tetap berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat dan publik internasional sebagai sebuah gebrakan untuk menyelamatkan wilayah negara itu sendiri dan ekosistem laut.

GLOSARIUM



AATHP	: The ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution
ACPT	: ASEAN Cooperation Plan On Transboundary Pollution
ADS	: African Drug Syndicate
AI	: Amnesty Internasional
AIHRC	: Afghan Independent Human Rights Commission
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association Of South East Asia Nations
ASEP	: ASEAN Environmental Program
ATS	: Amphetamine Type Stimulant
CCTV	: Closed-Circuit Television
Cifor	: Center for International Forestry Research
CPC	: Communist Party Of Tiongkok
CS	: <i>Copenhagen School</i>
CSIS	: Center For Strategic And International Studies
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DVD	: Digital Video Disk
ESCAP	: The United Nations Economic And Sosial Commission For Asia And The Pacific
EU	: Europe Union/ Uni Eropa
FAO	: The Food And Agriculture Organization Of The United Nations
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRW	: Human Right Watch
ICC	: International Criminal Court



ICIJ	: Internasional Consorsium Investigative Journalists
Inpres	: Instruksi Presiden
INTERPOL	: International Police
IUUF	: Illegal, Unreported and Unregulated Fishing
KRI	: Kapal Perang Indonesia (KRI)
KKP	: Menteri Kelautan Dan Perikanan
NGO	: Non-Government Organisation
NTS	: Non Traditional Security
OBOR	: One Belt One Road
PACE	: Parents Against Child Exploitation
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDEA	: The Philippine Drug Enforcement Agency
PSMA	: Port State Measures Agreement (PSMA)
RA	: Republic Act
RFMO	: Regional Fisheries Management Organization
RI	: Republik Indonesia
SBY	: Susilo Bambang Yodhoyono
ST	: Security Studies
UNDP	: United Nations Development Programme
UNEP	: United Nations Environment Programme
UNODC	: The United Nations Offices On Drugs And Crime
UU	: Undang-Undang
WHO	: World Health Organisation
WWF	: World Wild Fund
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

INDEKS

AIHRC, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 34, 40, 154
ASEAN, 14, 70, 89, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 116, 125, 132, 133, 142, 147, 150, 151, 154, 159
bacha bazi, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 39, 40, 42, 148
Copenhagen School, 2, 5, 15, 67, 89, 97, 118, 146, 152, 154
diskriminasi, 49, 51, 60, 61
ekosistem laut, 15, 119, 129, 153
Eksplorasi seksual, 17, 26
Filipina, 14, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 125, 128, 135, 137, 139, 147, 150, 159
Framing, 67, 87, 89, 99, 100, 106, 107, 151
Indonesia, 2, 14, 15, 66, 70, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 158, 159
IUUF, 15, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 152, 153, 154
Jepang, 158
kedaulatan negara, 4, 119, 125
Model Sekuritisasi, 9
Non-Traditional Security, 4, 15, 41, 63, 142, 158, 159
OBOR, 50, 51, 149, 155

PBB, 5, 13, 14, 29, 30, 31, 34, 40, 59, 60, 73, 82, 83, 124, 127, 131, 155
Presiden Joseph Estrada, 74
Rodrigo Duterte, 14, 66, 74, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 150
Sekuritisasi HAM, 82
Sekuritisasi kabut, 97, 98, 100, 102, 106, 110, 111
Sekuritisasi Narkoba, 14, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 82,
Speech act, 6, 49, 67, 68, 121
Studi keamanan, 4, 44
Tiongkok, 13, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60,
61, 62, 127, 128, 135, 137, 139, 149
Two-Level Games, 14, 94, 96, 110, 115
Uighur, 13, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 64, 65, 147, 149, 159
Xinjiang, 13, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 147, 149, 15

TENTANG PENULIS

AGUS TRIHARTONO adalah Staf Pengajar di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Jember, Indonesia. Ia pernah menjadi peneliti di Ritsumeikan Global Innovation Research Organization (R-GIRO), Ritsumeikan University, Jepang. Saat ini, ia adalah peneliti di Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora [C-RiSSH] dan Institute for *MariTime* Studies [IMaS] Universitas Jember, dan Pilar Data Research and Consulting (Pilar Data Indonesia). Minat penelitiannya adalah Regionalisme Asia, Human Security, Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi, Soft Power, Keamanan Maritim, dan Polling Politik. Ia menyelesaikan program Doktor dan Magisternya di Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang.

SUYANI INDRIASTUTI adalah Staf Pengajar pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember, Indonesia. Ia pernah menjadi peneliti di Institute of Asia Pacific Studies, University of Nottingham, Inggris. Saat ini, ia adalah peneliti di Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora [C-RiSSH], Universitas Jember. Minat penelitiannya adalah Ekonomi

Politik Internasional, Sustainable Development, Resources Politics, dan Human Security. Ia menyelesaikan program Doktor di School of Politics and International Relations, University of Nottingham, Inggris.

CHAIRUN NISYA adalah Research Assistant di Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora [C-RiSSH] dalam Riset tentang Identifikasi dan Konstruksi Gastrodiplomasi Indonesia, Universitas Jember. Ia baru saja menyelesaikan studi Sarjananya di Departemen Hubungan Internasional Universitas Jember pada tahun 2018. Minat penelitiannya adalah Diplomasi Publik, Soft Power, Studi Keamanan, Non-Traditional Security dan Resolusi Konflik.